



## Studi Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2022

Esty M. Tempoh<sup>1✉</sup>, Suryo S. Hadiwijoyo<sup>2</sup>, Elly E. Kudubun<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial Dan Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Indonesia

Email : [352019025@student.uksw.edu](mailto:352019025@student.uksw.edu)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi program PKH di kecamatan Essang Selatan dengan menerapkan teori strukturasi dan konsep evaluasi kebijakan public. Pendekatan strukturasi digunakan untuk memahami interaksi antara actor-aktor yang terlibat dalam implementasi program dan bagaimana struktur sosial mempengaruhi hasilnya. Konsep evaluasi kebijakan public digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, kesetaraan, dan dampak program PKH. Melalui pengumpulan data kualitatif, penelitian ini akan menganalisis implementasi program, partisipasi masyarakat, peran actor-aktor terkait, dan keberlanjutan program. Dengan demikian Program PKH di Kecamatan Essang Selatan berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam konsep evaluasi kebijakan public.

Kata Kunci: *Online Customer Review, Virtual Try On, Keputusan Pembelian*

### Abstract

This study aims to evaluate the PKH program in Essang Selatan Subdistrict using the theory structuration and the concept of public policy evaluation. The structuration approach is used to understand the interactions among actors involved in program implementation and how social structures influence its outcomes. The concept of public policy evaluation is employed to assess the effectiveness, efficiency, equity, and impact of the PKH program. Through the collection of qualitative, this research will analyse program implementation, community participation, the role of relevant actors, and program sustainability. Thus, the PKH program in South Essang Subdistrict has successfully achieved the predetermined goals in the concept of public policy evaluation.

Keyword: *Program PKH, Structuration, Public Policy Evaluation, Essang Selatan Subdistric*

## PENDAHULUAN

Kebijakan program bantuan sosial di Indonesia menjadi satu hal yang sangat penting, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa negara berkewajiban atau bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan berupa transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Bansos difokuskan untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat agar terlepas dari permasalahan rantai kemiskinan yang berkepanjangan, mendorong dan mempercepat pertumbuhan masyarakat miskin menjadi masyarakat yang produktif, mandiri, dan sejahtera. Menanggapi hal tersebut pemerintah Indonesia melalui kementerian sosial membentuk suatu program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) (Elia N. d., 2021). Dalam pasal 1 ayat 1 permensos No.1Tahun 2018, PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial dalam kluster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan Pendidikan dan kesehatan kepada keluarga/seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Tujuan diberlakukannya program PKH dalam jangka Panjang adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku rumah tangga miskin yang relative kurang mendukung peningkatan kesejahteraan kelompok miskin. PKH dialokasikan ke daerah-daerah yang memenuhi syarat yang telah ditentukan, sampai dengan tahun 2014 PKH telah mencakup pada 33 provinsi, 336 kabupaten/ kota, 3.429 kecamatan, dengan total penerima 2,7 juta KSM (Rizayani & Syaharuddin, 2023).

Kabupaten Kepulauan Talaud adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, dengan Ibu Kota Melonguane. Kabupaten Talaud berasal dari Pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud pada Tahun 2002. Kabupaten Talaud merupakan daerah yang melaksanakan program keluarga harapan (PKH) sebagai program pengentasan kemiskinan. Kabupaten Talaud terletak di bagian utara pulau Sulawesi yang berbatasan langsung dengan laut Filipina, memiliki luas wilayah 1,251 km<sup>2</sup> serta jumlah kecamatan sebanyak 19 kecamatan, 11 kelurahan, dan 142 Desa. Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud juga merupakan suatu permasalahan sosial yang cukup krusial, yang mana angka kemiskinan di kabupaten Talaud masih terbilang sangat besar,

sehingga membuat banyak warga Talaud memiliki kelas ekonomi yang sangat rendah. Dengan demikian hal tersebut mendapatkan perhatian oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Melalui program- program pengentasan kemiskinan, yaitu salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dengan harapan dapat menurunkan angka kemiskinan yang ada di Talaud. Sebagian masyarakat Talaud kurang memahami adanya pendampingan dalam penanggulangan kemiskinan dari pemerintah, sehingga pernah terjadi kasus pendataan masyarakat penerima bantuan PKH yang kurang valid, dimana masyarakat yang seharusnya tidak menerima lagi dikarenakan ekonomi yang sudah membaik, justru masih tetap menerima bantuan PKH. Dari permasalahan di atas kemungkinan diakibatkan karena kurangnya sosialisasi pemerintah terkait program PKH serta proses pembaruan data yang tidak berkala. Adapun Presentase Kemiskinan di kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2018 mencapai 9.50%. Sedangkan Jumlah Kemiskinan yang terjadi Di kecamatan Essang selatan mencakup 5 desa yaitu, Desa Sambuara, Desa Ensen, Desa Batumbalango, Desa Ambia dan Desa Kuma tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 3.811 serta jumlah keluarga miskin mencapai 571 keluarga miskin. Hal ini membuat kecamatan Essang selatan menjadi kecamatan no 7 terbanyak jumlah penduduk serta KK miskin dari 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Penelitian ini menggunakan teori Strukturasi dalam menganalisis program PKH yang ada di Kecamatan Essang Selatan. Dalam teori ini menjelaskan bahwa Salah satu usaha menggabungkan agensi dan struktur yang paling terkenal dan diungkapkan dengan jelas adalah Teori Strukturasi Anthony Giddens. Giddens melangkah begitu jauh dengan mengakatan "setiap penyelidikan riset di dalam ilmu-ilmu sosial atau sejarah terlibat di dalam menghubungkan Tindakan (sering digunakan secara sinonim dengan agensi) dengan struktur. Sebaliknya tidak ada pengertian Ketika astruktur menentukan Tindakan . Giddens menyurvei sederetan luas teori-teori yang mulai dengan individu/agen contohnya interaksionisme simbolik atau masyarakat/ struktur contohnya fungsionalisme structural dan menolak kedua kutub tersebut. Giddens berargumen bahwa lebih tepat adalah kita harus mulai dengan "praktik-praktik sosial yang berulang".Untuk memberi rincian sedikit lagi, dia berargumen: "domain dasar dari studi ilmu-ilmu sosial, menurut teori strukturasi, bukan pengalaman actor individual, juga bukan keberadaan segala bentuk totalitas sosial, tetapi praktik-praktik sosial yang tersusun lintas ruang dan waktu. Selanjutnya untuk mempertajam analisis dalam penelitian ini juga menggunakan konsep evaluasi kebijakan public dalam menganalisis evaluasi dari program PKH ini, yang mana dalam konsep tersebut menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab dari

kegagalan suatu kebijakan yang dilaksanakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan public yang telah dilaksanakan tersebut sudah bisa meraih hasil yang diinginkan. William N. Dunn menjelaskan bahwa proses pembentukan kebijakan public terdiri dari agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Dunn, 2003). Evaluasi berfungsi untuk memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, pada konteks ini evaluasi menilai seberapa jauh pemenuhan nilai yang dapat dicapai dari implementasi kebijakan. Evaluasi dalam Kebijakan public harus memiliki kriteria penilaian antara lain Dimensi Efektivitas, Dimensi Efisiensi, Dimensi Kecukupan, Dimensi Pemerataan, Dimensi Responsivitas, Dimensi Ketepatan (Dehani et al., 2018).

Studi evaluasi Program Keluarga Harapan telah menjadi perhatian para peneliti dan akademisi guna menilai sejauh mana program ini telah mencapai tujuan-tujuannya. Penelitian sebelumnya telah memberikan gambaran awal tentang keberhasilan dan kendala implementasi program ini di tingkat lokal. Beberapa penelitian sebelumnya telah melibatkan survei, wawancara, analisis data, dan pengamatan lapangan untuk memahami dampak dan efektivitas PKH dalam memberdayakan keluarga miskin. Namun, di tengah progres yang telah dicapai oleh penelitian sebelumnya, masih ada beberapa gap yang perlu dijelajahi lebih lanjut dalam studi evaluasi PKH di Kecamatan Essang Selatang. Beberapa gap yang perlu diperhatikan antara lain, Evaluasi jangka Panjang (Alexandri, 2020). Meskipun beberapa penelitian telah mengungkapkan hasil awal yang menggembirakan, penting untuk melihat dampak jangka panjang dari PKH di Kecamatan Essang Selatang. Studi yang memperpanjang periode penelitian dan mengevaluasi keberlanjutan manfaat yang diberikan oleh program ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang keberhasilannya dalam mengatasi kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan keluarga miskin. Selanjutnya Evaluasi kualitatif. Meskipun penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada data kuantitatif, penelitian kualitatif yang lebih mendalam dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana program ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari keluarga penerima manfaat. Studi kualitatif dapat membuka wawasan tentang perubahan sosial dan ekonomi yang telah dialami oleh keluarga miskin berkat partisipasi dalam PKH (Arifin, 2021). Dengan mengisi gap-gap penelitian di atas, studi evaluasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Essang Selatang dapat memberikan wawasan yang lebih lengkap tentang keberhasilan, tantangan, dan potensi program ini dalam mencapai tujuan pembangunan sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan dan perbaikan program ini di masa mendatang, serta membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam

meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin.

## METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa, kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. pengambilan informan dilakukan secara snowball dengan memilih informan sebanyak 8 (delapan) orang. Penelitian dilakukan di Kecamatan Essang Selatan, mulai tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan 10 Juli 2023. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi (Bogdan & Biklen, 2007). Untuk memperoleh informasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) sumber yaitu : (1) data primer yaitu data otentik atau data langsung dari orang pertama yang menyangkut pendapat dari informan tentang permasalahan penelitian, data ini diperoleh dari hasil wawancara atau observasi. (2) data sekunder yaitu data yang dikutip dari sumber lain yang bersifat autentik dan sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Sehubungan dengan hal itu maka yang akan dijadikan data sekunder adalah naskah tertulis, arsip-arsip, buku atau dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian yang diperoleh dari instansi terkait.

Dalam konteks PKH di Kecamatan Essang Selatan, teori strukturasi dapat digunakan untuk memahami bagaimana struktur program dan tindakan individu saling mempengaruhi dalam implementasi program. Pertama-tama, aspek struktur PKH perlu dianalisis. Struktur program mencakup kebijakan dan pedoman yang mengatur pelaksanaan PKH, alokasi anggaran, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan. Analisis terhadap struktur program PKH dapat melihat apakah kebijakan dan pedoman telah cukup jelas dan mudah dipahami oleh petugas dan peserta PKH di kecamatan tersebut. Selain itu, alokasi anggaran yang memadai dan mekanisme pengawasan yang efektif juga penting untuk memastikan implementasi program yang baik (Dehani et al., 2018).

Selanjutnya, perlu dianalisis juga tindakan individu dalam implementasi PKH di Kecamatan Essang Selatang. Tindakan individu meliputi petugas yang bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan, pendamping PKH, serta keluarga penerima manfaat. Analisis terhadap tindakan individu dapat melihat sejauh mana petugas dan pendamping PKH memahami kebijakan dan pedoman program serta kemampuan mereka dalam memberikan pendampingan yang efektif kepada keluarga penerima manfaat. Dalam konteks teori strukturasi, interaksi antara struktur program dan tindakan individu menjadi sangat penting. Bagaimana struktur program PKH diinterpretasikan dan dijalankan oleh petugas dan peserta PKH akan berdampak pada efektivitas implementasi program.

Misalnya, jika petugas tidak memahami kebijakan dan pedoman dengan baik, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menyalurkan bantuan kepada keluarga penerima manfaat. Begitu pula, jika keluarga penerima manfaat tidak memahami kewajiban dan hak mereka dalam program, mereka mungkin tidak dapat memanfaatkan bantuan dengan maksimal. Selain itu, interaksi antara struktur program dan tindakan individu juga dapat membentuk ulang struktur itu sendiri. Misalnya, pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh petugas dalam pelaksanaan PKH dapat menyebabkan perubahan dalam kebijakan pada pedoman program. Begitu pula, partisipasi dan tanggapan keluarga penerima manfaat dapat mempengaruhi penyesuaian dalam struktur program yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka (Domri et al., 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program sosial yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Program ini memberikan bantuan keuangan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu.

Tabel. 1 Skema Bantuan PKH

Kategori	Jumlah Bantuan Per Tahap
Ibu/Hamil/Menyusui	Rp 750.000
Usia Dini/Balita	Rp 750.000
SD	Rp 225. 000
SMP	Rp 375.000
SMA	Rp 500.000
Lanjut Usia (Lansia)	Rp 600.000
Disabilitas Berat	Rp 600.000
Total	Rp 3.800.000

Sumber : Pusat Pedoman Umum PKH 2021

Salah satu kecamatan yang mengimplementasikan PKH adalah Kecamatan Essang Selatan. Dalam evaluasi PKH di Kecamatan Essang Selatan, teori strukturasi dapat membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan implementasi program tersebut. Dengan memperhatikan interaksi antara struktur program dan tindakan individu, langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat diidentifikasi. Misalnya, jika terdapat kesenjangan dalam pemahaman kebijakan dan pedoman, pelatihan tambahan dapat diberikan kepada petugas dan pendamping PKH. Selain itu, mekanisme komunikasi yang lebih efektif antara semua pihak terlibat dapat diperkuat untuk meningkatkan partisipasi

dan pemahaman keluarga penerima manfaat. Dalam kesimpulannya, analisis menggunakan teori strukturasi dapat membantu dalam mengevaluasi implementasi PKH di Kecamatan Essang Selatang. Dengan memahami interaksi antara struktur program dan tindakan individu, perbaikan yang tepat dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Penting juga untuk terus memantau dan mengevaluasi implementasi program ini guna mencapai tujuan utama PKH, yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Kecamatan Essang Selatan. Selain itu untuk menjelaskan lebih rinci mengenai evaluasi kebijakan PKH ini kemudian dapat digunakan enam aspek yang terdapat dalam konsep kebijakan public yakni aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan (A Firdaus Ekardo, 2014).

### Aspek Efektivitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (W, 2019). Untuk menilai apakah Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterapkan di Kecamatan Essang Selatan berhasil atau tidak adalah faktor kunci yakni efektivitas pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada keluarga miskin atau rumah tangga yang sangat miskin. Berdasarkan hasil penelitian lapangan mengenai efektivitas kebijakan PKH di Kecamatan Essang Selatan, program ini telah mencapai tujuannya, terutama dalam hal pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran anak peserta PKH di sekolah, yang mencapai 85% dari total masa aktif sekolah yang ditetapkan. Keberhasilan ini juga dapat dinilai dari meningkatnya kesadaran KSM/RTSM tentang pentingnya perawatan kesehatan, yang ditunjukkan oleh kunjungan rutin ibu hamil, pasca melahirkan, dan keluarga dengan balita ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, pustu, atau posyandu (Hasil Wawancara, Kadis Dinas Sosial Talaud, 2023). Dalam aspek ini sama halnya dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang mana dalam penelitian-penelitian sebelumnya, aspek efektivitas yang dihasilkan oleh program PKH semuanya berhasil, dengan melihat semakin banyaknya anak-anak yang bersekolah dengan bantuan dana dari program PKH. Berdasarkan teori Giddens, Kebijakan Keluarga Harapan memberikan bantuan finansial kepada keluarga miskin di kecamatan ini. Struktur ini memengaruhi tindakan individu dan kelompok dengan mendorong mereka untuk mengikuti program dan mengakses layanan yang disediakan oleh kebijakan tersebut. Dengan demikian, struktur kebijakan membentuk perilaku masyarakat

## Aspek Kecukupan

Kecukupan dapat diartikan sebagai pemenuhan segala kebutuhan atau keperluan dasar kehidupan keluarga yang sangat miskin, baik secara fisik maupun mental. Dengan kata lain, kecukupan melibatkan pemenuhan kebutuhan sandang, papan, dan pangan, serta kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan keluarga miskin (Purba, 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa menjadi anggota Keluarga Sangat Miskin (KSM) atau Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Essang Selatan memiliki dampak positif bagi kelangsungan hidup anggota keluarga. Selain menerima bantuan yang mengurangi beban pengeluaran harian, anggota keluarga miskin juga mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang memuaskan dari petugas yang bertanggung jawab. Dalam layanan kesehatan, keluarga miskin termasuk ibu hamil, ibu setelah melahirkan, dan anak balita mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas kesehatan. Selain mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis, mereka juga diberikan tambahan makanan bergizi untuk ibu dan anak. Kecukupan gizi yang dimaksud mencakup pemenuhan kebutuhan kalori, protein, mineral, dan vitamin. Jika kebutuhan tersebut terpenuhi dengan pasti, maka angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan.

Situasi yang serupa terjadi juga dalam bidang pendidikan, di mana semua anak yang menjadi peserta PKH memperoleh pemenuhan kebutuhan mereka, baik dalam hal pembelajaran di sekolah maupun dalam kebutuhan perlengkapan dan peralatan sekolah. Hal ini akan meningkatkan prestasi belajar anak-anak dari keluarga sangat miskin, sehingga memberikan dukungan bagi masa depan mereka dan pembangunan manusia secara menyeluruh. Namun demikian, kebijakan PKH belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah sosial-ekonomi yang dihadapi oleh KSM/RTSM. Masih ada keluarga sangat miskin yang terdaftar sebagai peserta PKH namun kehidupan mereka tetap rentan dan tidak berdaya dari segi ekonomi dan sosial, karena beberapa keluarga lebih memilih berhutang untuk menutupi kebutuhan yang kurang (Hasil Wawancara, Pendamping PKH Kec Essang Selatan, 2023). Hal ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwasannya dalam aspek kecukupan PKH sangat positif dan sudah sepenuhnya mencukupi kebutuhan. Namun ada salah satu penelitian sebelumnya yang sama yakni penelitian dari Ika Ayu Nurrohman, di Desa Balongmasin Kab. Mojokerto (Ika 2022), yang menjelaskan bahwa aspek kecukupan masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan KSM/RTSM, diakibatkan mereka masih lebih memilih berhutang juga. Berdasarkan teori Giddens aspek kecukupan ini sama halnya dengan aspek efektivitas yang mana struktur mempengaruhi tindakan agen.

## Aspek Efisiensi

Efisiensi merujuk pada upaya mencapai hasil yang optimal tanpa membuang banyak waktu dan biaya yang dikeluarkan. Aspek ini selalu mempertimbangkan hubungan antara input dan output yang dihasilkan (Rosana E. , 2019). Jika dilihat dari segi efisiensi, Kebijakan PKH di Kecamatan Essang Selatan sudah terbukti efisien. Meskipun bantuan dana yang diterima terbatas, Hal ini tetap diimbangi oleh pemerintah setempat sehingga kebijakan program tetap berjalan dan membawa dampak positif dalam meningkatkan ekonomi keluarga yang sangat miskin serta mempercepat akses mereka terhadap layanan pendidikan dan Kesehatan di Kecamatan Essang Selatan. Bantuan PKH memudahkan rumah tangga sangat miskin untuk mengakses layanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil, ibu nifas, dan balita. Hal yang sama juga berlaku dalam layanan pendidikan, di mana bantuan PKH dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah bagi anak-anak mereka (Hasil Wawancara, Camat Essang Selatan, 2023). Hal ini berbeda dengan beberapa penelitian yang sudah ada, seperti penelitian dari Ika Ayu Nurrohma (Ika 2022), yang mana dalam aspek ini efisiensi program PKH di Desa Balongmasin masih hanya sebatas pemenuhan sumber daya manusia, sedangkan pemenuhan sumber daya waktu dan fasilitas di nilai masih kurang efisien. Aspek efisiensi ini jika dilihat melalui kacamata strukturasi Giddens merupakan pengaruh dari struktur dalam hal ini adalah program PKH terhadap perilaku agen dalam hal ini penerima manfaat, atau pengaruh struktur terhadap agen.

## Aspek Pemerataan

Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan mengacu pada kebijakan atau upaya yang diberikan secara adil. Dengan kata lain, suatu program dapat dianggap efektif dan efisien jika biaya atau manfaatnya didistribusikan secara merata kepada kelompok atau sasaran program (Saragi et al., 2021). Tujuannya adalah memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan status sosial antara kelompok dan golongan. Evaluasi terhadap Kebijakan PKH di Kecamatan Essang Selatan, dalam hal aspek pemerataan, dapat dinilai dalam dua bentuk. Pertama, pemberian pelayanan telah dilakukan secara merata kepada peserta PKH, baik dalam layanan pendidikan maupun kesehatan, tanpa adanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Kedua, pendistribusian bantuan PKH tidak merata kepada keluarga sangat miskin di Kecamatan Essang Selatan dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah. Hal Ini berarti bahwa PKH belum sepenuhnya mencakup seluruh keluarga sangat miskin di wilayah tersebut. Selain

itu, penyaluran bantuan PKH dilakukan dengan variasi kepada peserta PKH. Variasi dalam hal ini merupakan kesalahan penyaluran yang mana ada beberapa penerima bantuan PKH yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut tapi tidak terdata sebagai penerima bantuan, sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang diatur dalam Pedoman Umum PKH (Hasil Wawancara, Pendamping PKH Kec Essang Selatan, 2023). Dalam aspek pemerataan dari penelitian terdahulu oleh Ika Ayu Nurrohmah (Ika 2022), pelaksanaan PKH di Desa Balongmasin bisa dinilai masih belum memenuhi kriteria pemerataan, dikarenakan masalah ketidaksesuaian data dengan kondisi di lapangan. Sama halnya dengan Penelitian penulis dimana aspek pemerataan di nilai belum efektif dikarenakan data yang ada tidak sesuai dengan kriteria penerima manfaat saat sudah di lapangan. Berdasarkan teori Strukturasi Giddens, Aspek pemerataan ini sama dengan dilema struktur, yang mana Program Keluarga Harapan menghadapi dilema struktural antara mempertahankan status quo dan mengubah struktur kemiskinan di kecamatan tersebut. Program ini mencoba memecahkan masalah kemiskinan yang telah lama ada, sambil mendorong perubahan perilaku dari agen-agen penyalur untuk tetap mengikuti pedoman-pedoman yang sudah ada, agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam penyaluran sehingga dalam penyaluran bantuan tersebut tidak lagi bervariasi melainkan merata.

#### Aspek Responsivitas

Responsivitas mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu (Takaredase et al., 2019). Dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Essang Selatan dari segi responsivitas, terdapat dua kriteria penilaian. Pertama, kebijakan PKH telah memberikan kepuasan baik bagi pemberi layanan kesehatan dan pendidikan maupun bagi peserta PKH yang merupakan keluarga sangat miskin. Kedua, kebijakan PKH telah mendapatkan respon atau dukungan positif dari pemerintah daerah setempat dan lembaga/instansi terkait lainnya. Dalam konteks layanan kesehatan, petugas kesehatan dapat dengan mudah mencapai peserta PKH karena keluarga miskin yang terdaftar sebagai peserta PKH termotivasi untuk mengunjungi fasilitas layanan kesehatan. Oleh karena itu, petugas kesehatan tidak perlu mengunjungi langsung rumah setiap keluarga sangat miskin yang membutuhkan layanan tersebut. Hal ini memberikan kepuasan tersendiri bagi petugas kesehatan karena cakupan layanan meningkat. Sementara dalam layanan pendidikan, pemberi layanan pendidikan, seperti guru, juga merasakan manfaat dan kepuasan yang sama. Dengan adanya bantuan PKH, anak-anak peserta PKH lebih termotivasi untuk aktif bersekolah karena kebutuhan mereka akan perlengkapan dan

peralatan pendidikan telah terpenuhi. Hal ini membuat guru merasa puas karena peserta PKH lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses belajar-mengajar (Hasil Wawancara, Camat Essang Selatan, 2023). Untuk aspek ini sebagian besar penelitian sebelumnya memiliki hasil yang positif misalnya penelitian dari Ika Ayu Nurrohman di desa Balongmasin (2022), yang menjelaskan bahwa responsivitas pada pelaksanaan PKH di Desa tersebut mendapatkan respon yang positif. Lagi-lagi dalam aspek Responsivitas ini jika dilihat berdasarkan struktur Giddens merupakan pengaruh dari struktur terhadap agen sama halnya dengan beberapa aspek sebelumnya.

#### Aspek Ketepatan

Keberhasilan Kebijakan PKH di Kecamatan Essang Selatan dapat dievaluasi dari segi ketepatan. Program ini dianggap sangat berharga dan bernilai bagi keluarga sangat miskin (RTSM), karena mampu mengubah pola perilaku mereka dan mendukung kelangsungan hidup anggota rumah tangga (ART) yang termasuk dalam Keluarga Sangat Miskin (KSM) (Akhyarudin, 2019). Adanya Kebijakan PKH telah membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan meningkatkan status kesehatan ibu dan bayi serta ketersediaan layanan kesehatan. Selain itu, kebijakan ini juga telah meningkatkan tingkat partisipasi sekolah, yang pada gilirannya mempercepat penanggulangan kemiskinan, terutama di antara mereka yang terdaftar sebagai peserta PKH. Dalam hal ketepatan, program PKH di kecamatan Essang Selatan ini masih belum mencapai kearah tepat, karena ada beberapa ART yang dapat digolongkan ke dalam keluarga menengah kemudian ART tersebut mendapatkan bantuan PKH, serta para penerima manfaat masih kurang mampu untuk beradaptasi dengan program pertanian moderen (Penggunaan alat-alat pertanian canggih, dan beberapa campuran pupuk moderen) yang telah di sosialisasikan melalui program PKH. Namun dalam segi Pendidikan, program PKH ini memberikan peningkatan yang mana dulunya siswa ada beberapa yang tidak bisa bersekolah akibat tidak memiliki biaya yang cukup, kini semua siswa baik SD maupun SMP kini sudah bisa bersekolah semuanya (Hasil Wawancara, Penerima Manfaat PKH, 2023). Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, Aspek ketepatan merupakan aspek yang paling banyak mendapatkan hasil yang negatif atau belum memenuhi kriteria ketepatan. Misalnya penelitian milik Ika Ayu Nurrohman (Ika 2022), yang menjelaskan bahwa sebagian besar peserta PKH masih enggan untuk memanfaatkan bantuan yang mereka terima untuk meningkatkan pendapatan keluarga, misalnya melalui wirausaha. Aspek ini apabila dilihat berdasarkan teori Giddens merupakan dampak tindakan terhadap struktur, yang mana apabila agen dalam hal ini penerima PKH mampu meningkatkan pendapatan mereka baik dari bidang pertanian maupun

kewirausahaan, mungkin struktur program PKH nantinya akan berubah, dan bukan lagi sebagai program dengan pemberian dana secara langsung.

Dengan kerangka Teori Strukturasi Anthony Giddens, kita dapat menganalisis evaluasi kebijakan Keluarga Harapan di Kecamatan Essang Selatan berdasarkan beberapa aspek di atas sebagai berikut:

**Pengaruh Struktur Terhadap Tindakan:** Kebijakan Keluarga Harapan memberikan bantuan finansial kepada keluarga miskin di kecamatan ini. Struktur ini memengaruhi tindakan individu dan kelompok dengan mendorong mereka untuk mengikuti program dan mengakses layanan yang disediakan oleh kebijakan tersebut. Dengan demikian, struktur kebijakan membentuk perilaku masyarakat. **Dampak Tindakan Terhadap Struktur:** Di sisi lain, tindakan individu dan kelompok juga memengaruhi struktur kebijakan. Misalnya, jika keluarga miskin berhasil meningkatkan pendapatannya melalui pelatihan yang diberikan oleh program, mereka mungkin menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan kurang bergantung pada bantuan pemerintah. Hal ini dapat memengaruhi evolusi kebijakan Keluarga Harapan di masa depan. Akan tetapi yang terjadi dilapangan berbeda, yang mana agen masih kurang mampu dalam optimalisasi program yang telah diberikan oleh struktur.

**Dilema Struktural:** Program Keluarga Harapan menghadapi dilema struktural antara mempertahankan status quo dan mengubah struktur kemiskinan di kecamatan tersebut. Program ini mencoba memecahkan masalah kemiskinan yang telah lama ada, sambil mendorong perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat dan pemerintah selaku penyalur. Keberhasilan program ini akan ditentukan oleh sejauh mana struktur kebijakan dapat beradaptasi dengan tindakan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. **Konteks Geografis dan Sosial:** Dimensi waktu ruang dan sosial juga sangat relevan. Kecamatan Essang Selatang memiliki tantangan geografis, seperti akses yang sulit ke pusat kesehatan dan pendidikan. Selain itu, sejarah kemiskinan yang panjang di daerah ini memengaruhi cara individu dan kelompok menghadapi kebijakan ini. Mereka mungkin memiliki skeptisisme terhadap keberlanjutan program ini berdasarkan pengalaman masa lalu.

## SIMPULAN

Dalam konteks Kecamatan Essang Selatang, evaluasi kebijakan Keluarga Harapan dapat dianalisis menggunakan kerangka Teori Strukturasi Anthony Giddens. Struktur kebijakan tersebut memengaruhi tindakan individu dan kelompok di daerah tersebut, sementara tindakan tersebut juga memengaruhi struktur kebijakan. Di sisi lain, program ini menghadapi dilema struktural yang berkaitan dengan perubahan dan pemeliharaan status quo dalam masyarakat yang memiliki tantangan geografis dan sosial tertentu. Dalam

evaluasi ini, keenam aspek dalam konsep kebijakan publik, yaitu ketepatan, efisiensi, pemerataan, responsivitas, ketimpangan, dan partisipasi, dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Pertama-tama, ketepatan program menjadi fokus penting dalam evaluasi. Program PKH di Kecamatan Essang Selatan berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pemenuhan kebutuhan keluarga sangat miskin, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, program ini berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga tersebut. Dalam konteks ketepatan, PKH memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi keluarga sangat miskin di wilayah tersebut. Selanjutnya, aspek efisiensi juga penting untuk dievaluasi. Program PKH di Kecamatan Essang Selatan telah mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan baik. Meskipun anggaran program terbatas, PKH mampu memberikan dampak positif dalam peningkatan ekonomi keluarga sangat miskin dan mempercepat akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, program ini mampu mencapai hasil yang maksimal tanpa membuang waktu dan biaya yang tidak perlu.

Selanjutnya, aspek pemerataan menjadi fokus penting dalam evaluasi program. Program PKH di Kecamatan Essang Selatan telah memberikan pelayanan secara merata kepada peserta program. Tidak ada perbedaan perlakuan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat, dan evaluasi menunjukkan bahwa PKH telah memberikan perlakuan yang adil dan merata kepada kelompok sasaran. Responsivitas program juga menjadi aspek yang dievaluasi dengan menggunakan teori strukturasi dan konsep kebijakan publik. PKH di Kecamatan Essang Selatan mampu memuaskan kebutuhan, preferensi, dan nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu. Program ini memberikan kepuasan bagi pemberi layanan kesehatan dan pendidikan, serta peserta PKH yang merupakan keluarga sangat miskin. Responsivitas ini tercermin dalam peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, peningkatan partisipasi dalam pendidikan, serta perubahan pola perilaku keluarga sangat miskin. Dalam mengurangi ketimpangan, PKH di Kecamatan Essang Selatan telah berhasil mencapai hasil yang signifikan. Program ini mampu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok masyarakat. Dengan memberikan perlakuan yang adil dan merata, PKH membantu mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga sangat miskin di wilayah tersebut. Terakhir, partisipasi keluarga sangat miskin dalam program menjadi aspek penting dalam evaluasi. PKH di Kecamatan Essang Selatan berhasil meningkatkan partisipasi keluarga sangat miskin dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Program ini memberikan dorongan bagi keluarga untuk aktif terlibat dalam kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan

mereka. Dalam hal partisipasi, PKH telah memberikan dampak positif dalam menggerakkan keluarga sangat miskin untuk mengambil peran aktif dalam perubahan kehidupan mereka. Secara keseluruhan, evaluasi program PKH di Kecamatan Essang Selatan dengan menggunakan teori strukturasi dan konsep kebijakan publik menunjukkan bahwa program ini efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. PKH berhasil dalam pemenuhan kebutuhan, meningkatkan akses, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan partisipasi keluarga sangat miskin di wilayah tersebut. Melalui pemahaman yang lebih komprehensif tentang keefektifan program ini, dapat dilakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi keluarga sangat miskin di Kecamatan Essang Selatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alexandri, M. B. (2020). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur Tahun 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 237–244.
- Arifin, I. P. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan Struktural (Telaah Teori Strukturasi Anthony Giddens). *Prosiding Seminar Nasional Sosiologi*, 2, 121–134.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Research for education: An introduction to theories and methods*.
- Dehani, M., Hernawan, D., & Purnamasari, I. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. *Jurnal Governansi*, 4(1), 45–56.
- Domri, D., Ridwan, R., & Jaya, M. (2019). Efektivitas program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 1(1), 1–16.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.
- Purba, A. (2019). *PERANAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN DKELURAHAN SIJAMBI KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNG BALAI*.
- Rizayani, S., & Syaharuddin, M. R. N. H. (2023). 7. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan di Kota Banjarbaru. *Kajian-Kajian Lokal Kalimantan Selatan*, 65.
- Saragi, S., Batoebara, M. U., & Arma, N. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(1), 1–10.
- Takaredase, J. T., Kaawoan, J. E., & Singkoh, F. (2019). Program Keluarga Harapan Dalam

Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Manumpitaeng. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).

Camat Essang Selatan, 2023. Wawancara terkait evaluasi program PKH di Kecamatan Essang selatan

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Talaud, 2023. Wawancara Terkait Evaluasi program PKH di Kabupaten Talaud dan Kecamatan Essang Selatan